

## MERETAS JALAN MENUJU KOTA IMPIAN: KOLABORASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MA Syaripudin<sup>1\*</sup>, Serlita Cindana Siregar<sup>1</sup>, M. Rayendra<sup>1</sup>, Elsa Saputri<sup>1</sup>, Sheila Maya Sari<sup>1</sup>, Yolanda Khaula Nuria<sup>1</sup>, Sewining Tiyas<sup>1</sup>, Shantica Melinda<sup>1</sup>

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), UIN Raden Intan Lampung

*email:* apunsyaripudin@radenintan.ac.id

**Abstract:** This article examines community service initiatives conducted through the Integrated Student Community Service (KKN-Terintegrasi) program at UIN Raden Intan Lampung. This program was implemented at the request of the Mayor of Bandar Lampung, who specifically sought optimal solutions for various local issues, including recurrent flooding within the city. Based on focus group discussions between Student Group 221 and local community stakeholders in flood-prone areas, a sustainable urban development model was formulated, emphasizing active collaboration among the government, academia, the private sector, and civil society. The methodology employed the Asset-Based Community Development (ABCD) framework with a participatory approach. The initiatives of Group 221 focused on three primary pillars: the circular economy, community-based environmental management, and the strengthening of social inclusion. The results demonstrate that collaborative initiatives are capable of producing innovative and sustainable solutions tailored to the needs of the city, while simultaneously fostering collective awareness regarding the importance of urban development oriented toward common wellbeing.

**Keywords:** community collaboration, dream city, and sustainable development.

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan KKN-Terintegrasi UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan KKN-Terintegrasi dilaksanakan atas permintaan Wali Kota Bandar Lampung yang secara khusus meminta solusi terbaik atas beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk musibah banjir yang terjadi secara berulang di Kota Bandar Lampung. Hasil diskusi kelompok 221 Mahasiswa UIN Raden Intan bersama potensi masyarakat di beberapa titik rawan, dirumuskan model pembangunan kota berkelanjutan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Metode diterapkan dengan pola ABCD (*Assets Base Community Development*), dengan pendekatan partisipatif. KKN-Terintegrasi kelompok 221 berfokus pada tiga pilar utama, yakni; perekonomian sirkular, pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas, dan penguatan inklusi sosial. Hasil menunjukkan bahwa inisiatif kolaboratif mampu menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan Kota Impian, serta dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan kota yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** kolaborasi masyarakat, kota impian, dan pembangunan berkelanjutan.

### PENDAHULUAN

Kota impian merupakan harapan dan impian masyarakat guna mewujudkan

lingkungan yang harmonis, nyaman, dan aman. Kota impian adalah visi tentang proses pembangunan wilayah perkotaan yang menjadi dambaan setiap warganya

dengan integrasi pembangunan yang menerapkan teknologi modern namun ramah lingkungan dan ramah tinggal (Febriansah et al., 2025). Kota Bandar Lampung memiliki sejarah panjang sebagai kota tertib dan religious yang tercermin dalam cita-cita “Kota Impian”. Aspirasi terhadap lingkungan perkotaan yang ideal bukan hanya nyaman untuk ditinggali, tapi juga dapat menghadirkan kebahagiaan bagi warganya. (Defriansyah, 2024). Kota impian dapat diwujudkan jika ada kolaborasi antar unsur, sinergitas program antar satuan serta kolaborasi dan kerjasama antar unit (Larisu, 2025).

Perencanaan kota yang matang meningkatkan kualitas hidup melalui layanan publik terintegrasi, seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Kota ideal juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang dinamis serta adaptif terhadap tantangan lingkungan melalui inovasi dan pengelolaan limbah yang efektif. Mengacu pada pandangan Markus Zahnd, Kota Bandar Lampung berpotensi dikembangkan sebagai smart city dengan tata ruang yang membahagiakan warganya. Dengan demikian, konsep kota impian menjadi instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera. (Prateppornnarong, 2025).

Perencanaan kota yang strategis tidak hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis. Infrastruktur yang modern dan regulasi yang mendukung, bisa menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi (Qotimah & Suguyarti, 2025). Meretas jalan kota impian berarti sebuah upaya menciptakan kota yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kota impian harus bisa menjawab tantangan melalui solusi yang inovatif, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan perlindungan terhadap ekosistem alami. Pentingnya mewujudkan kota impian guna memastikankan pertumbuhan yang adil dan inklusif bagi semua, adanya perumahan yang layak, layanan sosial yang terjangkau, dan ruang publik yang aman dan nyaman untuk semua, dan untuk mencapainya dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (Herawati et al., 2025). Langkah kuncinya antara lain; *Penyusunan Rencana Induk*: diperlukan ada cetak biru yang jelas dan komprehensif sebagai panduan arah pembangunan kota yang komprehensif; *Partisipasi Publik*: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan; *Pemanfaatan Teknologi*: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan layanan publik; *Investasi dalam Sumberdaya Manusia*: Latih dan dukung para ahli yang memiliki visi untuk membangun kota yang lebih baik.

Kota impian bukan imajinasi belaka, melainkan sebuah gagasan yang terus berkembang dan dikaji oleh para ahli di bidang perkotaan. Kota impian merupakan sebuah kota yang layak huni (*livable city*), di mana kualitas hidup warga menjadi prioritas utama (Wahyuni et al., 2025). Kota impian memiliki ruang yang memungkinkan interaksi sosial sehat dan membahagiakan warganya, mencakup akses ke ruang publik, taman kota, dan tempat rekreasi. Para ahli bersepakat bahwa kota hijau (*green city*) harus harmonis dengan alam, seperti Kota Freiburg di Jerman, yang

sukses mengurangi penggunaan mobil pribadi dan memperbanyak ruang terbuka hijau bebas polusi, banjir, dan sampah harus diatasi dengan solusi yang berkelanjutan (Seyhan, 2026).

Kota impian telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas hidup, bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang mewujudkan masyarakat cerdas (*smart society*), masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tatakelola lingkungan tempat dimana mereka tinggal (Esfandi & Byrne, 2026).

D. Hahlweg mendefinisikan kota impian sebagai *a city for all people*, kota untuk semua orang. Kota impian harus menyediakan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi semua penduduknya, tanpa memandang latar belakang. Ini juga berarti kota harus ramah bagi kaum difabel, anak-anak, dan lansia (Defriansyah, 2024).

Kota impian bukanlah kota yang sempurna tanpa masalah, sebaliknya harus terus berbenah berinovasi dan beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman demi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Gagasan mewujudkan kota impian dilakukan oleh peserta KKN-Terintegrasi kelompok 221, dengan penuh tanggung jawab dalam aksi pengabdian kepada masyarakat melalui *desain* kota impian.

## METODE

Program pengabdian ini menerapkan pendekatan Assets Based Community Development (ABCD). Konsep ABCD sebagai suatu strategi dalam pengem-

banagan masyarakat. Bahwa masyarakat tidak boleh lagi disebut sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki potensi. Masyarakat harus dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi dan aset internal, bukan objek yang lemah (M. A. Syaripudin et al., 2025). Tahapan ABCD meliputi: (1) *Discovery*, yaitu pendataan dan identifikasi potensi serta permasalahan; (2) *Dreams*, yakni Penjaringan aspirasi masyarakat mengenai kondisi ideal yang diharapkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (3) *Design*, yakni Perancangan model kegiatan secara bersama dan yang relevan dengan kebutuhan.; (4) *Destiny*, merupakan Pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian masyarakat.

Selain ABCD, digunakan pula metode *Participatory Action Research* (PAR) untuk menghubungkan proses penelitian dengan perubahan sosial nyata melalui penguatan kepemimpinan lokal dan komitmen bersama. PAR berbeda dengan penelitian konvensional. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local leader* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Subjek dalam PAR bukan objek pasif, melainkan mitra peneliti. (Rahmat & Mirnawati, 2020).

## PEMBAHASAN

### Tantangan Pembangunan Kota

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung Bapak Yusnandi Ferianto, bahwa Implementasi kota impian

memiliki hambatan yang sangat krusial, diantaranya masih banyak Gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan juga tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana isi Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung, Undang-undang no. II Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Walikota Bandar Lampung saat pembukaan KKN menyatakan bahwa implementasi Kota Impian sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola menggunakan teknologi, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Keputusan Walikota nomor: 341/III.HK/2024.

Batasan struktural dalam mewujudkan kota impian, antara lain; *Keterbatasan Sumberdaya*, meliputi ketersediaan finansial untuk infrastruktur besar dan kelangkaan sumber daya alam seperti air bersih; *Aspek Sosial-Budaya*, yakni adanya resistensi terhadap perubahan serta kesenjangan sosial yang menghambat pemerataan kesempatan; serta *Tata Kelola Politik*, yakni adanya inkonsistensi visi pembangunan akibat adanya pergantian kepemimpinan dan birokrasi yang kurang efisien (Moreira & Duarte, 2023). Untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat tiga pilar utama: (1) Ekonomi Sirkular; pendekatan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada penghilangan limbah dan polusi, penggunaan kembali produk, serta regenerasi alam. Berbeda dari pola linier "ambil-buat-buang", pilar ini menjaga bahan tetap berputar untuk menciptakan nilai ekonomi dan mengurangi dampak lingkungan (Aswad, 2022); (2) Pengelolaan lingkungan berbasis komunitas; pendekatan

partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjaga kelestarian alam, terutama dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Metode ini fokus pada pemberdayaan, peningkatan kesadaran, serta tanggung jawab kolektif untuk mengurangi pencemaran. Upaya ini menempatkan masyarakat sebagai pemimpin dalam pelestarian alam, melalui inisiatif bank sampah dan pemanfaatan kearifan lokal (Articha & Frinaldi, 2025); (3) Inklusi sosial; proses meningkatkan partisipasi semua orang dalam masyarakat, terutama kelompok minoritas atau rentan, dengan memberikan hak, kesempatan, dan akses setara terhadap layanan (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) tanpa diskriminasi. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang dapat merangkul keberagaman, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam setiap pengambilan keputusan (Larisu, 2025).

### **Keterbatasan Sumberdaya**

Keterbatasan sumber daya dalam pembangunan kota dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, keterbatasan anggaran, di mana pembangunan infrastruktur seperti transportasi publik, ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan limbah membutuhkan biaya besar. Untuk mengatasinya, KKN-Terintegrasi Kelompok 221 mengusulkan perencanaan yang disiplin, peningkatan efisiensi, serta kreativitas dalam mencari alternatif pendanaan. Selain itu, perlu dilakukan prioritas program dengan memfokuskan pada kegiatan yang paling krusial dan mengurangi program yang kurang mendesak. Kedua, keterbatasan sumber

daya alam, seperti ketersediaan air bersih, energi, dan kualitas udara, yang semakin tertekan akibat pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, KKN Kelompok 221 mengusulkan langkah-langkah seperti konservasi lingkungan, pemanfaatan bahan substitusi, penerapan daur ulang, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan di masa depan.

### **Keterbatasan Sosial dan Budaya**

Konsep kota ideal di satu tempat belum tentu berhasil diterapkan di tempat lain karena perbedaan nilai dan tradisi, hal ini disebabkan adanya: Resistensi terhadap perubahan; tidak semua masyarakat siap menerima perubahan besar, misalnya penataan ulang kawasan kumuh menjadi permukiman vertikal, dan sebagainya karena mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup sebelumnya; Kesenjangan sosial: sulitnya menciptakan kota impian karena masih adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang memunculkan masalah sosial dan ekonomi.

Menghadapi situasi ini, KKN kelompok 221 melakukan sosialisasi budaya piil pesenggiri (falsafah dan pandangan hidup masyarakat) terhadap masyarakat di Bandar Lampung.

### **Keterbatasan Politik dan Tata Kelola**

Sistem politik dan tata kelola pemerintah memiliki pengaruh besar dalam pembangunan kota (Pratama et al., 2024), hal ini karena: Perbedaan Visi Politik, pergantian pemimpin biasanya mengubah

arah pembangunan. Sebuah proyek yang sudah direncanakan dengan matang bisa terhenti karena visi pemimpin yang berbeda; Birokrasi yang lambat: proses perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan utama pembangunan dan inovasi. Guna mengurangi dampak tersebut, KKN kelompok 221 mengusulkan pendekatan sistemik yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta reformasi birokrasi yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

### **Keterbatasan Ruang dan Waktu**

Tidak ada kota yang bisa dibangun dalam semalam, pembangunan sebuah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi (Marindra et al., 2025). Ruang yang terbatas membuat penambahan fasilitas baru sulit dilakukan tanpa membongkar bangunan yang sudah ada. Waktu yang dibutuhkan dalam membangun kota impian bukanlah proyek yang selesai dalam satu atau dua tahun, dibutuhkan waktu yang Panjang dan berkelanjutan (Prateppornnarong, 2025).

Karena itu pembangunan harus dapat memberi insentif bagi masyarakat agar terus menjaga lingkungan karena ada manfaat langsung yang mereka rasakan. Pengelolaan lingkungan tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari kehidupan yang dilakukan dengan kesadaran dan gotong royong, sehingga lingkungan terkelola dengan lebih baik dan berkelanjutan. Ketika semua orang bisa berkontribusi dan berkembang, potensi kolektif meningkat secara signifikan. (Firdaus & Mursalin, 2022).

## **Implementasi Program KKN-Terintegrasi**

KKN-Terintegrasi kelompok 221 menginternalisasi gagasan melalui program "*Kota Impian*", meliputi penggalan aspirasi melalui survei autentik, membangun sinergi dengan aparatur pemerintah daerah, serta melibatkan langsung warga dalam aksi nyata seperti pembuatan biopori dan penanaman pohon. *Menggali Aspirasi Masyarakat*: Kola-borasi dimulai dengan pemetaan dan mendengarkan. Mahasiswa tidak datang dengan ide yang sudah jadi, tetapi berinteraksi langsung dengan warga melalui survei, FGD dan pertemuan informal guna memahami masalah yang dihadapi. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan dan prioritas yang autentik, seperti kebutuhan adanya taman bermain yang aman, adanya *jogging track* di area Ruang Terbuka Hijau, dan sebagainya (M. A. S. M. A. Syaripudin et al., 2025). *Membangun Sinergi dengan Pemerintah dan Tokoh Lokal*: Mahasiswa berperan sebagai jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah. Ini melibatkan kerja sama erat dengan Lurah, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. *Partisipasi Warga dalam Implementasi*: Kolaborasi tidak berhenti pada tahap perencanaan. Warga terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Ketika warga ikut membangun, mereka akan merasa bahwa kota impian itu milik bersama, bukan sekadar program mahasiswa KKN.

Tidak ada definisi tunggal tentang kota impian karena setiap orang memiliki harapan berbeda. Namun, secara umum kota ideal mencakup enam dimensi utama. Pertama, Smart Governance, yakni pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,

responsivitas, dan partisipasi publik. Kedua, Smart Living, yaitu integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan. Ketiga, Smart Environment, berfokus pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan, seperti pengolahan sampah, energi alternatif, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Keempat, Smart Economy, yakni penguatan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi melalui digitalisasi UMKM dan e-commerce. Kelima, Smart Society, yang menempatkan manusia sebagai pusat, dengan peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan literasi digital melalui ekosistem sosial-teknis. Keenam, Smart Branding, yaitu strategi pencitraan kota berbasis data dan teknologi untuk meningkatkan daya tarik serta daya saing wilayah. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, keenam indikator ini masih dalam tahap pengembangan sesuai master plan 2021–2026. Kota impian tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh rasa aman, baik siang maupun malam, serta tumbuhnya rasa memiliki antarwarga. Kehadiran ruang publik yang mendorong interaksi sosial turut memperkuat kebersamaan. Dengan demikian, kota impian bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah yang menghadirkan rasa aman dan solidaritas bagi seluruh penghuninya. (Rohmah et al., 2025).

## **SIMPULAN**

Pembangunan kota impian bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan visi kolektif untuk menciptakan lingkungan

yang inklusif, berkelanjutan, aman, damai dan membahagiakan dengan integrasi antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan rasa kepemilikan warga.

Kota Impian merupakan pusat inovasi yang ramah bisnis, mampu menarik investasi, dan menyediakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan, juga tersedianya lapangan kerja yang beragam. Pada akhirnya kota impian mampu menciptakan komunitas yang kuat, solid, dan harmonis. Kota Impian adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik, dimana kebahagiaan warga, kemakmuran ekonomi, dan kelestarian lingkungan akan berjalan beriringan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yth: Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta Jajaran yang telah memformula kegiatan KKN-Terintegrasi, sehingga KKN yang dilaksanakan berdampak baik pada situasi kehidupan masyarakat di Kota Bandar Lampung; Walikota Bandar Lampung, atas support dan fasilitasi yang diberikan juga pendampingan yang melekat terhadap pelaksanaan KKN-Terintegrasi UIN Raden Intan Lampung.

#### DAFTAR PUSTAKA

Articha, D. S., & Frinaldi, A. (2025). Efektivitas Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Kota Layak Huni (Livable City) Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 542–551.

Aswad, W. O. S. J. (2022). Analisis gap & pencapaian indikator smart city readiness dalam program pembangunan daerah kabupaten wakatobi. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 170–192.

Defriansyah, D. (2024). INOVASI KOTA DI DUNIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENGHUNI KOTA MELALUI KONSEP SMART CITY DAN PENERAPAN INOVASI KOTA IMPIAN DI KABUPATEN BANYUASIN. *Jurnal Rekayasa Lampung (JRL)*, 3(1).

Esfandi, S., & Byrne, J. (2026). Smart solar integration insights from four pioneers: Masdar City, Stockholm, Freiburg, and San Diego. In *Urban Energy Transition* (hal. 23–56). Elsevier.

Febriansah, F., Jonathan, A., Laura, J. F. P., & Cahyono, A. S. (2025). Smart City Di Singapura Dan Di Indonesia Dalam Konsep Perbandingan E-Government. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(2), 416–425.

Firdaus, M. A., & Mursalin, A. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin. *Banua Law Review*, 4(2), 196–203.

Herawati, A. R., Dwimawant, I. H., & Pradana, A. E. (2025). Agile and dynamic governance: Driving smart city innovations in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 10(4), 340–363.

Larisu, Z. (2025). Komunikasi untuk Pembangunan dan Inklusi Sosial di Kawasan ASEAN: Strategi, Tantangan, dan Praktik Terbaik. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu*

- Sosial (SNIIS)*, 4, 1155–1164.
- Marindra, A. M. J., Santaki, D. S., Kurniawan, D., Maulana, F. I., Widjaksana, R. A., Amzari, M. I., Saputra, P. J. B., Minggu, C. A. E. P., & Fauzan, R. (2025). Implementation of Solar-Powered Water Pump and Monitoring System for Hydroponic Urban Farming. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(2), 320–327.
- Moreira, F. D. C., & Duarte, E. (2023). Landscaping Promoting Sustainable Comfort in Cities. In *Urban Horticulture-Sustainable Gardening in Cities*. IntechOpen.
- Pratama, I. N., Subandi, A., Imam, S., Pratiwi, Y. E., Aprileana, Lady, & Oktriani, E. (2024). Pendampingan Sustainable Livelihood Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rembitan. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 7(3), 359–368.
- Prateppornnarong, D. (2025). Cities and sustainability: Exploring contributions, opportunities and challenges of smart city implementation towards social sustainability. *Urban Governance*, 5(1), 69–78.
- Qotimah, M. K., & Suguyarti, R. (2025). Implementasi Program Smart Living Di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. *Solidaritas*, 9(1).
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.
- Rohmah, R., Dyana, B., Hambali, R., Al-Hakim, A. F., & Kurniawan, A. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah KOHE Ternak Kambing sebagai Media Tanam. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(3), 371–376.
- Seyhan, B. (2026). Green Economy Practices in Selected Cities of the European Union: The Cases of Amsterdam, Freiburg, Copenhagen and Ljubljana. *Kent Akademisi*, 19(3), 1–22.
- Syaripudin, M. A., Rosul, A., Fisabilillah, M. R., Febriyani, T., Putri, P. A., Alfarizi, K. M., Azzahra, V., Andari, A. W., Nurhayati, N., & Rahmalia, S. (2025). Fostering Social Entrepreneurs Through Community Service Programs. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 373–380.
- Syaripudin, M. A. S. M. A., Wibowo, T., Apriada, Y. J., Romadhoni, A., Dewi, T. M., Santika, M., Azzahra, A., Septia, S., & Asmara, M. (2025). Membangun Kemandirian Karang Taruna Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 8(1), 68–74.
- Wahyuni, S., Listiana, I., Syaripudin, A., & Aglina, E. F. (2025). *Islam and Sustainable Development : Integrating Spirituality and Social Responsibility*. September 2024.